

# ***Political Polarization dan Political Disinformation: Pertarungan Wacana Pelemahan KPK dalam Memengaruhi Political Behavior***

**Thomas Tatag Yana K<sup>1</sup>, Endah Ayuning Rostiati<sup>2</sup>, Ignatius Ardhana<sup>3</sup>,  
Ahmad Zidan<sup>4</sup>**

**Diserahkan:** 7 Desember 2021 | **Diterima:** 24 Oktober 2022 |

**Diterbitkan:** 30 Desember 2022

## **Abstrak**

*Artikel ini membahas tentang polarisasi politik dan disinformasi politik dalam rangkaian agenda pelemahan KPK yang berdampak pada perilaku politik masyarakat di Twitter. Artikel ini menggunakan konsep political polarization, political disinformation, dan political behavior. Tulisan ini menggunakan metode big data analysis untuk pengambilan data dan analisis data. Selanjutnya, metode tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan polarisasi isu, isi wacana, dan aktor sebagai opinion leader. Artikel ini juga melakukan pemetaan dan analisis kritis tentang narasi yang diproduksi di media sosial, khususnya Twitter. Wacana dan aktor dalam rangkaian agenda pelemahan KPK disoroti melalui tiga peristiwa, yaitu peristiwa Revisi Undang-Undang KPK, terpilihnya Ketua KPK Firlil Bahuri, dan Tes Wawasan Kebangsaan. Temuan yang disampaikan di tulisan ini, yaitu polarisasi politik di antara kelompok pro pemerintah dan oposisi pemerintah dan disinformasi politik*

---

1 Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.

2 Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.

3 Departemen Manajemen Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada.

4 Departemen Teknik Informasi, Universitas Gadjah Mada. Email: ahmadzidan@mail.ugm.ac.id.

*yang diproduksi dengan membawa isu taliban dan isu radikalisme. Pada akhirnya, perilaku politik masyarakat dalam agenda pelemahan KPK cenderung melekatkan diri pada influencer yang memiliki orientasi politik yang serupa.*

**Kata Kunci:** *polarisasi; disinformasi; perilaku politik; demokrasi; wacana; big data analysis.*

## **PENDAHULUAN**

Artikel ini berupaya melihat polarisasi dan disinformasi di media sosial *Twitter* dalam konteks wacana pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya pelemahan KPK sudah dimulai sejak tahun 2019 yang ditandai dengan revisi Undang-Undang KPK. Setelah kejadian itu, banyak penyesuaian terjadi di KPK dari mulai pergantian ketua KPK hingga Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) (CNN Indonesia, 2019). Isu KPK memang seksi di ranah publik, hal itu pun yang menyebabkan isu KPK ramai dibicarakan di ruang-ruang publik. Wacana pelemahan memicu berbagai protes di jalan maupun di media sosial. Berbagai narasi pro kontra senantiasa muncul dari oknum-oknum tertentu yang seakan mencoba untuk memecah opini publik.

Perbincangan di media sosial, khususnya *Twitter* terkait wacana pelemahan KPK sangat masif. Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Ismail Fahmi, mengatakan hampir ada satu juta

percakapan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rentang 10 hingga 17 September 2019 di media sosial (CNN Indonesia, 2019). Isu yang hadir di media sosial sebagian besar berisi narasi, seperti polisi taliban, KPK ditunggangi, isu radikalisme, narasi kepentingan dari kekuasaan, dan masih banyak lainnya. Di sisi lain, isu KPK selalu menyita perhatian publik baik pro maupun kontra, seperti halnya terkait kasus pemberhentian 75 pegawai KPK. Ismail Fahmi dalam wawancaranya bersama CNN mengatakan bahwa percakapan yang terjadi di *Twitter* hanya ada dua kluster pro dan kontra TWK (Purnama, 2021).

Kajian ini penting dilakukan karena wacana pelemahan KPK mendapat sorotan besar dari publik yang menciptakan berbagai bentuk gerakan sosial, baik di media sosial maupun di jalanan. Atensi publik yang meningkat menciptakan keberagaman respons masyarakat terhadap fenomena pelemahan KPK. Narasi yang berkembang di media sosial berpotensi menciptakan *echo chamber* yang kemudian akan menggiring opini publik sesuai dengan kepentingan mereka. Sehingga tulisan ini berusaha melihat wacana yang saling bersaing di dalam isu pelemahan KPK. Selain itu, tulisan ini juga berusaha membongkar pola aktor yang bersaing dalam isu pelemahan KPK yang menciptakan *political polarization* dan *political disinformation*.

Pertanyaan yang dijawab dalam tulisan ini, yaitu bagaimana *political polarization* dan *political disinformation* muncul dalam wacana pelemahan KPK? Bagaimana implikasi dari persebaran wacana pelemahan KPK pada *political behavior* masyarakat di media sosial? Dengan menghubungkan dimensi isu dan perilaku masyarakat, tulisan ini berusaha melihat dampak dari wacana pelemahan KPK terhadap preferensi masyarakat melalui emosi, sentimen, pola jaringan aktor, intensitas produksi kata, yang diperlihatkan dalam hasil analisis *big data*.

Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode *big data analysis* guna untuk pengambilan data dan analisis data. Data yang diolah dalam tulisan ini diambil dari *Twitter* dengan kata kunci yang merepresentasikan tiga kejadian, RUU KPK, pergantian Ketua KPK, dan Tes Wawasan Kebangsaan KPK yang diambil dari tanggal 1 September 2019–31 Juli 2021. Selanjutnya, data tersebut divisualisasikan menjadi *Social Network Analysis* (SNA), *sentiment analysis*, dan *wordcloud*. Metode tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan polarisasi isu, wacana, dan aktor dalam wacana pelemahan KPK. Studi ini bertujuan untuk melihat pengaruh *political polarization* dan *political disinformation* terhadap perilaku politik masyarakat di media sosial yang terpolarisasi di lanskap demokrasi Indonesia.

Afrimadona (2021) menjelaskan bahwa polarisasi politik terjadi dengan adanya perpecahan ideologi dalam dimensi sekularisasi politik. Selain itu, dalam konteks *electoral*, Afrimadona (2021) mengungkapkan bahwa ideologi dan keputusan untuk memilih kandidat memiliki hubungan dua arah. Hubungan dua arah ini memiliki makna bahwa seseorang dapat menjadi pemilih atau pengikut seorang pemimpin dan di sisi lain, seseorang juga dapat menjadi bagian dari kelompok politik untuk memengaruhi ideologi atau sikap politik seseorang (Afrimadona, 2021). Dengan kata lain, polarisasi politik dalam media sosial dapat dibentuk melalui narasi populis untuk menghidupkan kembali sensitivitas ideologi seseorang dalam menentukan pilihan politiknya.

Maulana dan Situngkir (2021) menemukan bahwa media berita arus utama terfragmentasi secara politik, dimana komunitas media mereka menjadi ruang gema politik bagi audiensnya. Maulana dan Situngkir (2021) berhasil menguraikan komposisi komunitas media partisan yang memiliki kecenderungan homogen secara politik. Hal ini menunjukkan bahwa media berita yang seharusnya menjadi jembatan antara dua kelompok yang terfragmentasi tidak berhasil menjalankan fungsinya. Dalam kajian tersebut menunjukkan bahwa media yang condong ke Jokowi selama kampanye pemilihan presiden 2019 cenderung

lebih mampu mengelompokkan atau membentuk klaster daripada kubu Prabowo (Maulana dan Situngkir, 2021). Fenomena tersebut semakin menunjukkan bahwa polarisasi politik yang terjadi di media sosial dibentuk oleh berbagai aktor politik dengan memanfaatkan narasi populis untuk membangkitkan sensitivitas ideologi dan media partisan untuk mengelompokkan orang ke dalam komunitas dunia maya yang homogen mengenai sikap politik.

Berbicara mengenai *political disinformation* dalam kajian Kuklinski *et.al.*, (2000) dalam Persily & Tucker (2020), menunjukkan bahwa orang yang salah mendapatkan informasi lebih cenderung percaya diri dengan keyakinan mereka daripada informasi yang benar. Dengan kata lain, informasi yang salah dapat mengakibatkan mispersepsi politik seseorang dan itu bisa dibentuk untuk tujuan tertentu melalui propaganda. Kuklinski *et.al.*, (2000) dalam kajiannya menunjukkan bahwa terdapat banyak orang yang memiliki keyakinan yang salah tentang berbagai aspek kebijakan kesejahteraan karena kebanyakan orang mendapatkan informasi yang salah. Tingkat intensitas seseorang menggunakan media sosial, struktur media sosial yang menciptakan ruang gema, dan disinformasi politik yang dipropagandakan merupakan lingkaran setan polarisasi politik. Oleh karena itu, dalil yang dikemukakan Ball-Rokeach dan DeFleur dalam Dan Nimmo

(2006) menjadi relevan dalam konteks ini, yaitu “semakin bergantung orang pada media untuk memperoleh informasi, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk mengubah kepercayaan, pandangan, dan nilai-nilai mereka sebagai hasil informasi yang dikemukakan.”

Di tahun 2013, Australian Coalition menggunakan sosial media untuk memengaruhi wacana publik. Para politisi dari berbagai partai memanipulasi publik dengan menggunakan akun palsu untuk meningkatkan jumlah *followers*, *likes*, *shares*, dan *retweets* yang diterima kandidat secara artifisial (Bradshaw & Howard, 2017). Lebih menarik lagi di Filipina, partai politik atau kandidat memanipulasi media sosial sebagai bagian dari strategi kampanye dan dilanjutkan ketika mereka mengambil alih kekuasaan (Bradshaw & Howard, 2017). Selain itu, aktor-aktor politik sering kali menggunakan *cyber troops* sebagai strategi *computational* propaganda dalam memanipulasi konsensus publik. *Cyber troops* adalah pemerintah, militer, atau anggota partai politik yang berkomitmen untuk memanipulasi opini publik menggunakan sosial media (Bradshaw & Howard, 2017). Kedua kajian tersebut menunjukkan bahwa aktor politik berperan besar dalam pembentukan persepsi publik di media sosial.

Selanjutnya, kajian mengenai perilaku politik di Indonesia sebagian besar didominasi oleh kajian terhadap perilaku masyarakat dalam memilih di pemilihan umum. Namun, terdapat beberapa kajian lain yang berfokus pada perilaku masyarakat dalam berpolitik di media sosial. Di antara kajian mengenai perilaku masyarakat dalam berpolitik di media sosial, antara lain *pertama*, kajian Rendi Riansyah (2019) yang berjudul “Pengaruh Media Sosial Facebook dan Instagram Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Kecamatan Gandus”. Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa media sosial telah menjadi kebutuhan baru dalam kontestasi politik saat ini, media sosial menjadi wadah untuk mendapatkan asupan berita informasi terbaru dan media dalam mencari simpati masyarakat seputar politik dibandingkan media konvensional. Media sosial memiliki potensi yang lebih besar dalam produksi dan persebaran informasi secara lebih efektif. Dengan kemampuan demikian, media sosial dapat berperan aktif dalam penguatan demokratisasi.

*Kedua*, Haidir Fitria Siagian (2015) dalam kajian “Pengaruh dan Efektivitas Penggunaan Media Sosial sebagai Saluran Komunikasi Politik dalam Membentuk Opini Publik” menjelaskan bahwa sebagai saluran komunikasi politik, media sosial memiliki kekuatan dalam memberikan pengaruh dan menentukan perilaku politik, karena media sosial dapat



berperan dalam membentuk opini publik. Melalui media sosial, substansi pesan-pesan politik lebih cepat dan mudah dicerna oleh khalayak. Sebab, setiap saat khalayak dapat mengakses informasi tanpa halangan dan batas geografis. Media sosial juga sangat efektif digunakan sebagai media komunikasi, khususnya dalam memberikan informasi dan menerima umpan balik dari khalayak.

*Ketiga*, kajian Ratu Tasya Andriani (2019) yang berjudul “Peranan Media Informasi dalam Mengarahkan Perilaku Politik” mengemukakan bahwa pengaruh media informasi dalam mengarahkan perilaku politik, yaitu sikap pemilih, partisipasi politik, pengetahuan politik, citra dan opini publik, serta minat memilih. Faktor-faktor yang memengaruhinya, yaitu faktor lingkungan simbolik, persepsi terhadap partai, keterdedahan media, literasi media dan pemanfaatannya, serta aktivitas politik.

*Keempat*, Kokom Komariah dan Dede Sri Kartini (2019) dalam kajiannya yang berjudul “Media Sosial dan Budaya Politik Generasi Milenial dalam Pemilu” menjelaskan bahwa mengenai media sosial beserta kontennya menjadi instrumen penting dalam menambah pengetahuan politik,

Pendidikan politik hingga membentuk pola perilaku politik generasi milineal. Generasi milenial juga memiliki komunitas yang menjadi wadah untuk berdiskusi terkait konten media sosial itu.

Secara garis besar, *political polarization* dan *political disinformation* selalu menjadi tidak berada dalam satu pondasi yang sama. Kedua hal tersebut jarang dilihat keterhubungannya. Sama halnya kajian mengenai perilaku politik masyarakat di media sosial hanya berfokus pada peran media sosial dalam membentuk perilaku politik mereka. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha mengelaborasi lebih jauh mengenai pengaruh *political polarization* dan *political disinformation* dalam memengaruhi perilaku politik masyarakat di lanskap demokrasi Indonesia. Dengan mengambil fokus mengenai isu pelemahan KPK, tulisan ini berusaha melihat bagaimana pertarungan wacana yang hadir di media sosial *Twitter* dapat memengaruhi perilaku politik masyarakat dalam menanggapi isu pelemahan KPK.

## **MENDEFINISIKAN *POLITICAL POLARIZATION*, *POLITICAL DISINFORMATION*, DAN *POLITICAL BEHAVIOR***

Tulisan ini menggunakan dua set teori dalam menganalisis objek kajian, yaitu *political polarization* dan *political disinformation* yang dikorelasikan dengan aspek *political behavior*. Kedua set teori tersebut di tulisan ini digunakan untuk melihat pola jaringan, aktor, wacana, dan mengidentifikasi pola perilaku masyarakat dalam menanggapi isu pelemahan KPK.

### **A. Political Polarization**

Dalam berbagai penelitian/pengkajian, media sosial selalu dijadikan lokus kajian untuk mendiskusikan *political polarization* dengan terbentuknya *echo chambers* yang menghalangi orang lain mendapatkan informasi yang berseberangan dengan kepercayaan mereka. Ide mengenai *echo chambers* dalam percakapan politik di media sosial mendapatkan kritikan dari berbagai peneliti. Guess *et.al.*, (2018) dalam Recuero *et.al.*, (2019) menjelaskan bahwa *echo chamber* sangat terbatas dalam memberikan pengaruh pada terbentuknya polarisasi politik. Namun, dengan *echo chamber* sistem *filter bubbles* dapat melakukan *social*

*filtering* berdasarkan preferensi individu yang dipercayai benar. Hal tersebut menciptakan fragmentasi yang dapat merusak proses ruang publik sebagai tempat diskusi politik dan mengkonsolidasikan demokrasi (Recuero *et.al.*, 2019).

Polarisasi politik yang terjadi di *Twitter* membuat orang-orang dengan pemikiran yang sama sangat tertutup dengan pandangan pihak berlawanan. Polarisasi sebagai ekspresi sikap bermusuhan terhadap saingan politik (Iyengar *et.al.*, 2012). Polarisasi dimaknai sebagai berbagai jenis sikap (misalnya: terhadap masalah, kelompok dalam, dan kelompok luar) dan keyakinan (misalnya: tentang sifat masalah yang diperebutkan), yang dapat dimanifestasikan dalam berbagai jenis perilaku (misalnya: ekspresi verbal, pola interaksi, dan pilihan politik) (Yarchi *et.al.*, 2020).

Berbicara mengenai *political polarization*, Takikawa & Nagayoshi (2017) menunjukkan bahwa media sosial memiliki kecenderungan untuk menciptakan ikatan homofilik. *Political homophily* didefinisikan sebagai kecenderungan politik orang-orang untuk melekatkan diri pada orang-orang yang memiliki orientasi politik serupa. Dalam kajian sebelumnya, terdapat dua pendekatan yang dipakai dalam studi polarisasi politik di *Twitter*, yaitu *entire field approach* dan *selective approach*. Kedua pendekatan ini lebih melihat bahwa *Twitter*

menjadi ruang yang mengakomodir diskursus antara wacana dan aktor. Kedua pendekatan ini senantiasa menghubungkan pola jaringan aktor dan substansi yang dapat menggambarkan polarisasi politik di media sosial.

*Entire field approach* berfokus pada struktur formal dari seluruh bidang politik yang ada di *Twitter* dan menyelidiki keberadaan polarisasi politik. Pendekatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi akun *Twitter* aktor politik (politisi nasional, aktivis sosial, dan media). Namun, pendekatan ini sangat terbatas karena orientasi politik yang menunjukkan polarisasi hanya didasarkan pada “following” akun-akun aktor politik. Hal ini berbeda dengan *selective approach* yang menekankan isi *tweet* untuk mengidentifikasi orientasi politik seseorang. Dengan demikian, orientasi politik dan polarisasi politik di *Twitter* dapat diidentifikasi melalui perilaku pengguna, yaitu “retweet” atau “mention.”

## **B. Political Disinformation**

Polarisasi tidak terjadi begitu saja. Polarisasi memerlukan pancingan dan umpan untuk membuat orang lain masuk ke dalam kelompok mereka. Polarisasi ini sering kali dibentuk dengan adanya arus informasi artifisial untuk menghadirkan persepsi konsensus publik yang salah sehingga menciptakan dukungan buatan untuk narasi politik, hal tersebut adalah

*political disinformation*. *Political disinformation* membentuk mispersepsi publik terhadap suatu wacana publik. Hal ini dapat diartikan bahwa polarisasi politik terjadi karena adanya disinformasi politik. Pertumbuhan polarisasi telah menimbulkan misinformasi politik yang berlebihan dan mengarah pada mispersepsi partisan yang meluas dengan teori konspirasi, mendistorsi kebijakan publik, dan mengintensifkan polarisasi (Persily & Tucker, 2020). Selanjutnya, kelompok yang terpolarisasi menciptakan ruang yang menerima konsensus bias berdasarkan motivasi dan dikonfirmasi oleh *opinion leader* (Druckman *et.al.*, 2018).

Kuklinski *et.al.*, (2000) menunjukkan bahwa terdapat banyak orang yang memiliki keyakinan yang salah tentang berbagai aspek kebijakan kesejahteraan dikarenakan kebanyakan dari mereka mendapatkan informasi yang salah. Tingkat intensitas seseorang menggunakan media sosial, struktur media sosial yang menciptakan ruang gema, dan disinformasi politik yang dipropagandakan merupakan lingkaran setan polarisasi politik. Oleh karena itu, dalil yang dikemukakan Ball-Rokeach dan DeFleur dalam Dan Nimmo (2006) menjadi relevan dalam konteks ini, yaitu “semakin

bergantung orang pada media untuk memperoleh informasi, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk mengubah kepercayaan, pandangan, dan nilai-nilai mereka sebagai hasil informasi yang dikemukakan.”

Disinformasi politik merupakan serangkaian misinformasi yang disusun untuk dipropagandakan (Persily & Tucker, 2020). Dengan kata lain, ada upaya dari aktor-aktor politik untuk dengan sengaja dan secara terorganisir menyebarkan informasi yang salah. Disinformasi politik ini dilakukan dengan propaganda yang terstruktur untuk memengaruhi orang dan memperkuat kepercayaan mereka. Salah satu jenis disinformasi politik yang sering dilakukan adalah “fake news.” *Fake news* atau berita bohong dibuat untuk menyesatkan pembaca dengan meniru tampilan artikel aktual dari organisasi media yang sudah mapan (Persily & Tucker, 2020). Berita bohong ini dibuat dengan menyesuaikan karakteristik target pembaca agar mudah membangun hubungan emosional. Dengan cara tersebut, aktor politik lebih mudah mengecilkan sudut pandang yang berlawanan.

### C. Political Behavior

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa *political polarization* dan *political disinformation* sedikit banyak bersinggungan dengan perilaku masyarakat di media

sosial. Dalam konteks media sosial, perilaku warga juga cenderung homofilik (Colleoni, Rozza, & Arvidsson, 2014). Artinya, mereka umumnya berinteraksi hanya dengan isu atau wacana yang paling dekat dengan pendirian politik mereka sendiri. Persebaran wacana di media sosial, khususnya *Twitter* mendorong publik untuk memilih dan memihak pada satu hal yang sering bersentuhan dengan mereka. Tulisan ini melihat bahwa perilaku politik masyarakat di media sosial dapat dilihat berdasarkan intensitas narasi, keterjangkauan narasi, dan aktor yang hadir dalam pembentukan narasi.

Lalu lintas informasi yang hadir di *Twitter* dan pola perilaku homofilik mengarah pada pembentukan *echo chamber* (Morozov, 2011) yang mendorong pengulangan pesan pada sistem tertutup. Pada akhirnya, pesan tersebut akan semakin mendominasi arus pemberitaan utama. Akibatnya, perilaku homofilik masyarakat memfasilitasi pengungkapan komunitas politik dan atribut laten pengguna di *Twitter* (Bruns & Highfield, 2013).

## **PERISTIWA RUU KPK**

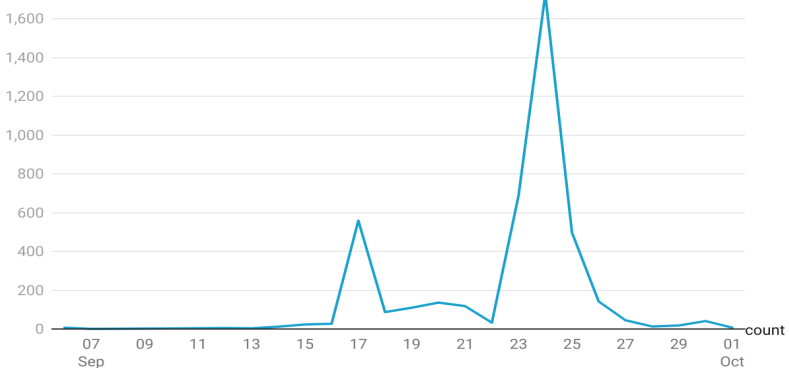
Sejak awal, proses pembahasan RUU KPK sudah dianggap penuh dengan kejanggalan. Hal ini dimulai tatkala kemunculannya yang tiba-tiba di penghujung masa jabatan anggota DPR, tidak dilibatkannya pimpinan KPK dalam



proses RUU, tidak masuknya RUU sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019 namun tetap diprioritaskan, hingga terselenggaranya rapat-rapat tertutup selama di DPR. Hal inilah yang kemudian menimbulkan protes utamanya di kalangan mahasiswa dan penggiat anti korupsi serta masyarakat yang menganggap pengesahan revisi UU KPK bersifat tidak semestinya.

Pengesahan RUU KPK juga menjadi isu yang ramai diperbincangkan masyarakat di kanal sosial media, salah satunya *Twitter*. Berikut merupakan grafik mengenai jumlah percakapan mengenai isu RUU KPK di *Twitter* melalui hasil *crawling* pada rentang 7 September 2020–1 Oktober 2020.

### RUU KPK

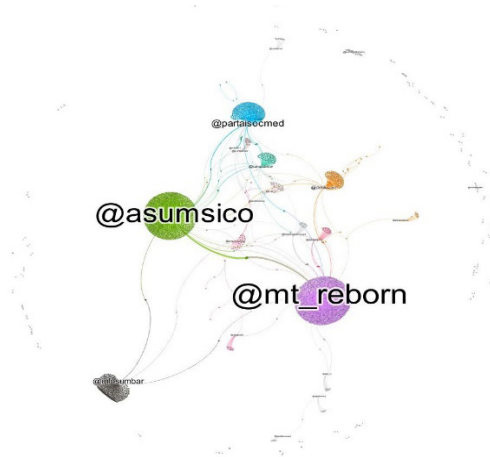


Created with Datawrapper

Sumber: Hasil Big Data Tim Penulis

Berdasarkan grafik tersebut, perbincangan mengenai RUU KPK sempat muncul dan menjadi ramai sejak tanggal 17 September 2020, bertepatan dengan waktu disahkannya RUU KPK. Hal ini ditandai dengan munculnya perbincangan yang mencatat topik RUU KPK dengan jumlah mendekati 600 *tweet*. Selanjutnya, pada 23 September 2020 percakapan mengenai RUU KPK mengalami peningkatan signifikan sampai 24 September 2020. Peningkatan jumlah percakapan secara tiba-tiba ini ditengarai oleh adanya eskalasi isu mengenai RUU KPK sebagai akibat dari aksi demonstrasi yang digencarkan oleh mahasiswa dan masyarakat secara umum. Naiknya percakapan mengenai isu RUU KPK hanya bertahan 1–2 hari. Terbukti, pada 25 September 2020 jumlah percakapan hanya berkisar pada 500 percakapan dan terus menurun hingga memasuki bulan Oktober 2020.

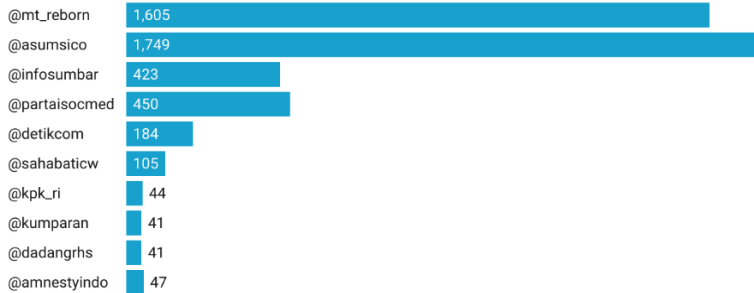
Selanjutnya, untuk mengetahui lebih spesifik mengenai siapa saja aktor yang bermain dalam perbincangan mengenai RUU KPK di laman *Twitter* tulisan ini menghadirkan proses pemetaan aktor dengan menggunakan pendekatan *Social Network Analysis* (SNA).



*Sumber: Hasil Big Data Tim Penulis*

Berdasarkan SNA mengenai topik RUU KPK, polarisasi diinisiasi oleh empat akun utama, yaitu @asumsi.co, @mt\_reborn, @partaisocmed dan @infosumbar. Hal ini terlihat dalam tabel berikut ini.

### Top Influencer RUU KPK



Created with Datarwrapper

Sumber: Hasil Big Data Tim Penulis

Akun @asumsi.co dan @infosumbar meskipun dikategorikan sebagai sesama kelompok media memiliki tanggapan yang berbeda atas isu ini. Akun @asumsi.co cenderung bersikap netral dan tidak memiliki *standing point* yang jelas dalam menanggapi isu RUU KPK, terlihat dalam beberapa cuitannya yang hanya berfokus pada penyampaian berita mengenai aksi demonstrasi. Hal ini berbeda dengan akun @infosumbar yang secara jelas menunjukkan posisinya sebagai pihak yang menolak RUU KPK. Salah satu cuitannya mendapatkan 955 *retweet*, *reply*, *like*, dan *quote*, yaitu:

*“DPRD Sumbar telah mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia tentang ketidaksetujuan terhadap pengesahan RUU KPK, serta menyetujui tuntutan dari aliansi mahasiswa di Sumbar (25/9)..#RUUKPK #TolakRUUKPK #AksiMahasiswa #HidupMahasiswa #Padang #SumateraBarat.”*

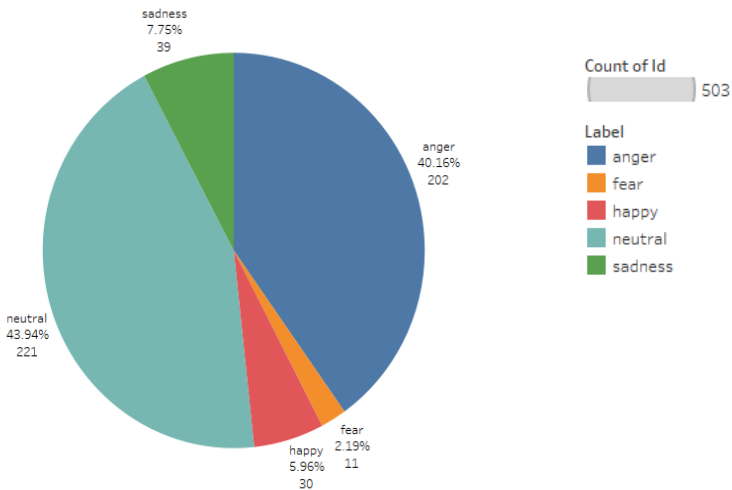
Akun @infosumbar secara tidak intensif berhubungan dengan beberapa akun lainnya, seperti @MTReborn. Narasi yang dicuitkan oleh akun @MTReborn mengandung kekecewaan terhadap kinerja Presiden dan DPR RI. Hal tersebut dapat dilihat melalui salah satu *top tweet*-nya yang mendapatkan jumlah 4.531 *retweet*, *reply*, *like* dan *quote*, yang berbunyi:

*“Jokowi minta Pengesahan Empat RUU ditunda. Wartawan: Kenapa beda Sikap dgn RUU KPK? Jokowi: Yg satu itu (RUU KPK), Inisiatif DPR. Yg lain disiapkan Pemerintah. Loh, RUU KPK kl Pemerintah gak setuju gak bakalan di Sah kan DPR juga kan...?!Makin bonyok dah DPR di mata Rakyat.”*

Selain itu, meskipun tidak memiliki *standing point* yang jelas mengenai keberpihakannya, tetapi akun @MTReborn memiliki hubungan yang sangat dekat dengan akun-akun oposisi pemerintah, seperti @partaisocmed dan @sahabaticw yang secara terang-terangan menolak adanya RUU KPK. Hal ini tercermin dalam berbagai cuitan @partaisocmed yang secara konsisten menolak RUU KPK.

Cuitan tersebut mendapatkan *engagement* yang cukup tinggi, yaitu 904 *retweet*, *reply*, *like*, dan *quote*, serta berkorelasi dengan narasi penolakan yang dicuitkan oleh @sahabaticw melalui salah satu *top tweet*-nya.

Selanjutnya, mengenai respons publik terhadap isu RUU KPK yang dikaji dalam tulisan ini dijabarkan melalui hasil analisis sentimen *tweet*, baik bergambar maupun tidak. Analisis sentimen ini membagi emosi publik menjadi enam tipe, yaitu *anger*, *fear*, *happy*, *love*, *sadness* dan *netral*.



Sumber: Hasil Big Data Tim Penulis

Berdasarkan diagram lingkaran tersebut, cuitan masyarakat masih didominasi oleh cuitan bernada negatif dengan besaran 40,16% cuitan bersentimen marah (*anger*), 7,75% bersentimen sedih (*sadness*), dan 2,19% bersentimen takut (*fear*). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sikap publik terhadap isu RUU KPK ini masih didominasi oleh penolakan atau ketidaksetujuan. Hal ini berarti bahwa pemerintah masih gagal dalam mendapatkan simpati publik terhadap agenda RUU KPK ini. Hal tersebut tidak terjadi begitu saja, tetapi juga diakibatkan oleh berbagai kegagalan serta kesalahan yang termuat dalam proses hingga material RUU KPK.

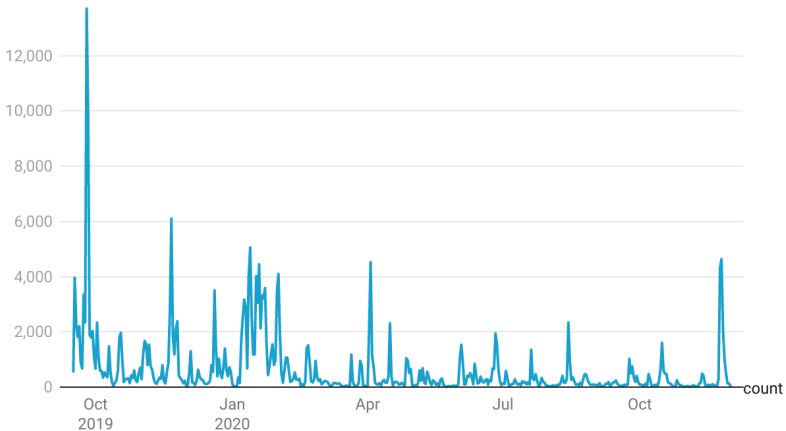
## **PERISTIWA PASCA PEMILIHAN KETUA KPK**

Setelah fenomena Revisi Undang-Undang KPK menuai kritik tajam dari masyarakat luas, indikasi upaya pelemahan KPK muncul dari proses pemilihan ketua KPK yang disoroti bermasalah. Dari 10 nama calon pimpinan KPK yang diajukan oleh Presiden Jokowi, beberapa nama dinilai publik cacat integritas. Hal ini diikuti dengan proses pemilihan calon pimpinan yang tidak transparan.

Aksi demonstrasi marak dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat dengan berbagai cara, seperti aksi turun ke jalan dan propaganda menyebar keresahan di media sosial.

Ada puluhan koalisi masyarakat, mahasiswa, aktivis, dan tokoh pemuka agama yang bicara untuk mengawal proses pemilihan calon pimpinan KPK agar berintegritas dan tidak bermasalah. Perbincangan di *Twitter* yang marak dengan kontroversi menjadi menarik untuk diteliti, mengenai bagaimana wacana bermain dan bagaimana aktor membawa narasi.

### Timeline Ketua KPK



Created with Datawrapper

*Sumber: Hasil Big Data Tim Penulis*

*Crawling* data di *Twitter* dilakukan mulai dari 16 September 2019 sampai 1 Oktober 2019 untuk melihat bagaimana wacana yang bermain setelah Ketua Pimpinan KPK (Firli Bahuri) terpilih. Dari rentang waktu tersebut, dapat dilihat bahwa di tanggal



25 September 2019 dan 26 September 2019, perbincangan mengenai Ketua KPK mencapai puncaknya. Di puncak interaksi tersebut, salah satu *influencer* yang mengirimkan cuitan adalah akun @fadhilasarii.

*“Ketua DPRD Jatim sampek lepas baju dan menyatakan secara PRIBADI kalo beliau gak setuju dengan RUU KPK dan RUU KUHP. (diliat sampek selesai gaes) #SurabayaMenggugat #HidupMahasiswa #MAHASISWABERSATU #MahasiswaHarusBergerak.”*

Dari cuitan tersebut terdapat narasi RUU KPK yang masih terus berlangsung walaupun isu terpilihnya ketua pimpinan KPK yang cacat integritas gencar bergulir.



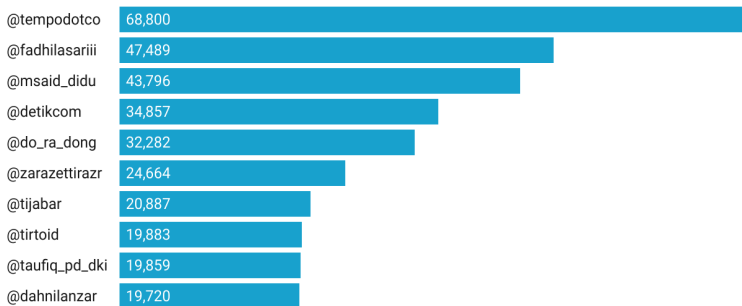
@fadhilasiarii3 juga terjadi polarisasi yang menunjukkan penolakan keras terhadap agenda pelemahan KPK. Dari SNA tersebut, kelompok @msaid\_didu dengan @fadhilasiarii3 sama-sama resisten dengan agenda pelemahan KPK. Menariknya, kedua jaringan tersebut tidak berinteraksi secara langsung. Hal ini terjadi karena cuitan @fadhilasiarii3 berfokus pada daerah di Jawa Timur sehingga polarisasi yang terbentuk bisa jadi hanya berisi oleh orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Jawa Timur.

Di pusat jaringan @dennysiregar7, polarisasi juga terbentuk dengan orang-orang yang setuju pada upaya pemerintah terhadap KPK. Jaringan tersebut diisi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM-Mohammad Mahfud MD, Ferdinand Hutahaean-mantan politisi Partai Demokrat, Rudi Valinka-penulis buku A Man Called Ahok, Eko Kuntadhi, dan Mochamad Arip. Dilihat dari SNA itu, maka dapat diketahui bahwa aktor-aktor tersebut memiliki interaksi yang dekat dan terpolarisasi. Dengan kata lain, mereka memiliki kecenderungan yang sama mengenai sudut pandang terhadap KPK.

Dari pembacaan SNA tadi, dapat dilihat bahwa posisi akun-akun media, seperti @tempodotco, @detikcom, @kompascom, dan @tirtoid berada di tengah, antara pusat jaringan @msaid\_didu dan @dennysiregar7.

Walaupun posisi media tersebut berada di tengah, bukan berarti media menjadi penghubung atau “bride” untuk *microsphere* bertemu dan bertukar informasi. Lebih cermat lagi, dapat dilihat bahwa posisi Koran Tempo (Biru) memiliki interaksi yang sangat dekat dengan akun-akun oposisi pemerintah dalam wacana pelemahan RUU KPK. Hal ini menunjukkan keberpihakan media Tempo dalam wacana pelemahan KPK.

### Top Influencer Ketua KPK



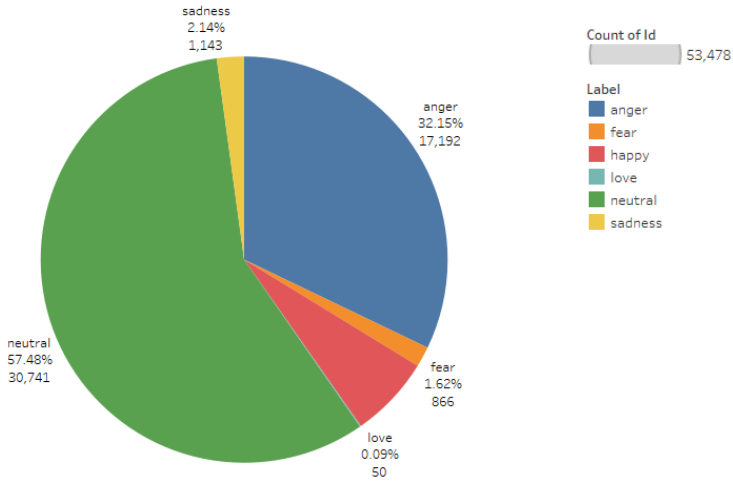
Created with Datawrapper

*Sumber: Hasil Big Data Tim Penulis*

Wacana tidak pernah terlepas dari peran aktor dalam upaya mendominasi wacana publik. Aktor merupakan magnet dari jaringan orang-orang yang memiliki kesamaan kecenderungan politik. Ketokohan yang dibangun oleh aktor dengan orientasi politiknya sering kali menjadi representasi dari pemikiran politik banyak orang. Oleh karena itu,

orang-orang cenderung melekatkan dirinya dengan sudut pandang yang dibangun oleh aktor tersebut. Aktor dapat berupa aktivis, politisi, maupun media. Dari data tersebut, terdapat 10 *influencer* yang terdiri dari beragam latar belakang. Akun tersebut memiliki latar belakang, sebagai berikut:

- a. @do\_ra\_dong adalah oposisi pemerintah
- b. @dahnilanzar alias Dahnil Anzar adalah politisi Partai Gerindra
- c. @zarazettirazr adalah akun *retweet* UMKM yang memosisikan diri sebagai oposisi pemerintah
- d. @tijabar adalah akun oposisi pemerintah dalam isu pelemahan KPK
- e. @taufiq\_pd\_dki adalah pengurus Partai Demokrat DKI
- f. @msaid\_didu adalah politisi
- g. fadhilasiariii3 adalah akun oposisi pemerintah
- h. @tempodotco, @tirtoid, dan @detikcom adalah media.



Sumber: Hasil Big Data Tim Penulis

Dari grafik tersebut, emosi publik mengenai ketua KPK selama wacana publik berlangsung menunjukkan 57,48% bersentimen netral, 32,15% bersentimen marah, 2,14% bersentimen sedih, dan 1,62% bersentimen takut, sedangkan sisanya 0,09% bersentimen senang. Data ini menunjukkan bahwa sentimen negatif menurun dibandingkan dengan peristiwa RUU KPK.

Disinformasi politik terjadi di dalam wacana pelemahan KPK. Isu yang disebar dalam wacana tersebut adalah keberadaan taliban yang menguasai KPK. Isu mengenai keberadaan taliban disebar oleh pihak pro pemerintah

dalam upaya pelemahan KPK. Wacana ini digunakan untuk mempersuasi masyarakat agar memiliki keberpihakan pada keputusan pemerintah mengenai pemilihan ketua KPK. Keberadaan taliban di KPK sampai sekarang belum dapat dibuktikan, namun sangat gencar dipropagandakan oleh orang-orang yang pro terhadap upaya pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan Zuiderveen Borgesius *et.al.*, (2018) yang menjelaskan bahwa kampanye disinformasi akan efektif jika mengaitkan posisi, retorika, atau perilaku yang tidak dapat diterima terutama kepada seorang politisi dan kemudian bekerja untuk mengidentifikasi dan menargetkan sub kelompok pemilih yang paling rentan terhadap persuasi.

Pemakaian isu taliban merupakan sebuah upaya untuk menysasar orang-orang dengan latar belakang nasionalis dan cinta bangsa karena mereka paling rentan terhadap persuasi yang isinya berusaha menjaga negara dari separatisme. Berikut contoh cuitan dari *Twitter* pihak pro pemerintah mengenai pergantian ketua KPK:

*"@Dennysiregar7 Para 'Taliban' KPK sudah sangat Gerah ada di Dalam, sayang Ketua Regunya ga ikut sekalian Mundur.. nggak Gentle lu Novel..ðŸ™," -@parthasaderi*

*“Busyro Muqoddas menjelaskan KELOMPOK TALIBAN yang dimaksud di @KPK\_RI merupakan mantan anggota Polri satu di antaranya NOVEL BASWEDAN. Berhembus Isu KELOMPOK TALIBAN di Tubuh KPK, Ini Penjelasan Mantan Ketua KPK, Novel Baswedan Salah Satunya.(3)” - @sirajapadoha.*

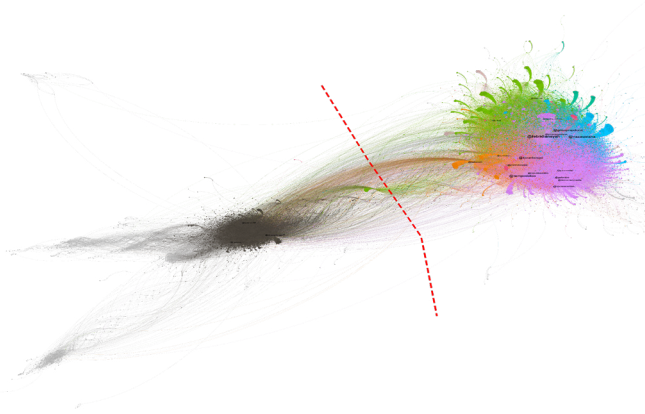
Dari cuitan tersebut, orang-orang dengan profil nasionalis yang berupaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa lebih mudah termakan isu taliban. Namun menariknya, respons dari pihak oposisi pemerintah membalas isu taliban dengan menyoroti kinerja KPK bukan terjebak pada perdebatan kusir. Misalnya, akun @phonodude yang lebih mementingkan kerja KPK dalam memberantas koruptor ketimbang memikirkan isu taliban yang belum pasti.

*“@Dennysiregar7 @\_digeembok @aniesbaswedan @tempodotco @KPK\_RI Mo taliban kek, mo kadrin kek, kpk dulu udh terbukti mampu mengungkap kasus besar dan memenjarakan pejabat tggil dan pimpinan partai politik....drpada kpk skrg yg nangkep harun masiku aja gak mampu boro2 memecahkan kasus bsr, maennya cuman berani receh dan jauh dr pusat kekuasaan.” - @phonodude.*



## PERISTIWA TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK) KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Demonstrasi di berbagai kota menunjukkan respons penolakan publik terhadap proses TWK. Tidak berhenti sampai di sini, gejolak dunia maya khususnya dalam platform *Twitter* juga menunjukkan adanya respons negatif dari publik. Namun, hal ini tidak lepas dari diskursus yang tercipta di media sosial. Wacana yang dibentuk terhegemoni dari beberapa aktor atau akun yang saling berinteraksi di media sosial, khususnya *Twitter*. Perang narasi pro kontra tidak sedikit juga yang terekam dalam tulisan ini. Maka dari itu, tulisan ini membahas bagaimana respons publik terhadap Tes Wawasan Kebangsaan. Tulisan ini menggunakan data *Twitter* yang dianalisis menggunakan *Social Network Analysis (SNA)*, dimana metode ini akan menunjukkan pola relasi antar aktor.



*Sumber: Hasil Big Data Tim Peneliti*

Dari visualisasi data tersebut, tulisan ini menjelaskan bahwa ada dua pusat jaringan yang saling berjauhan dengan pola hubungan yang berbeda. Kedua pusat jaringan tersebut membuktikan adanya polarisasi antara kubu pro pemerintah dan oposisi pemerintah. Kubu pro pemerintah didominasi warna hitam, yang bisa diartikan bahwa mereka mempunyai persamaan interest dan narasi *tweet*. Namun, tulisan ini menemukan hal unik, dimana narasi tersebut hanya diproduksi dari akun @dennysiregar7, @rizmaya\_, dan @syarman59. Bisa disimpulkan bahwa tidak ada produksi wacana dan narasi selain dari ketiga akun tersebut.

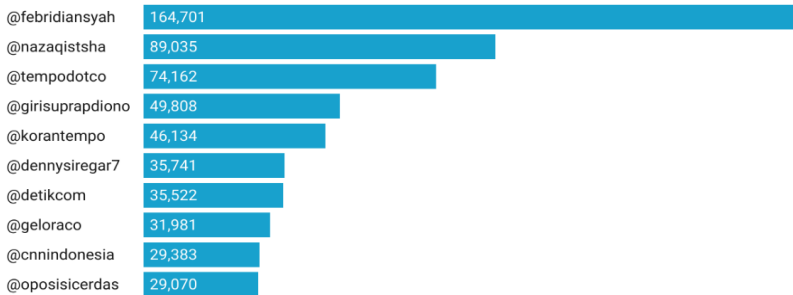
Di bagian lain, pusat jaringan kontra pemerintah didominasi oleh media nasional, seperti @tempodotco, @cnnindonesia, @detikcom yang *framing* narasinya condong ke kontra Tes Wawasan Kebangsaan. Hal ini dibuktikan bahwa akun media tersebut berada dalam satu jaringan bersama @febridiansyah seorang pegiat anti korupsi, @nazaqistha yang biasa disebut Novel Baswedan, dan @dendhylaksono pengamat politik yang juga aktif dalam gerakan sosial masyarakat. Uniknya, akun @tempodotco dan @korantempo menjadi media yang paling konsisten dalam menyuarakan narasi kontra TWK dibandingkan dengan media lain.

Kajian dalam tulisan ini menemukan pola unik, dimana media nasional selalu berada di tengah di antara kubu pro maupun kontra. Namun dalam kasus ini, beberapa media nasional memilih keberpihakannya pada narasi kontra TWK. Bisa dikatakan bahwa reproduksi informasi masih dipegang oleh media-media nasional arus utama. Didukung dengan akun lain yang kontra menyebabkan narasi kontra TWK menjadi narasi dominan di publik mengalahkan narasi pro TWK.

Data *topinfluencer* juga membuktikan bahwa narasi kontra TWK terhegemoni di media sosial. Akun @febridiansyah, @nazaqistha, dan @tempodotco menjadi akun yang paling

konsisten dalam menyuarakan kontra narasi terhadap TWK. Disusul dengan akun @dennysiregar7 yang juga mempunyai *engagement* tinggi, membuktikan bahwa ada perang narasi antara pihak pro TWK dan kontra TWK.

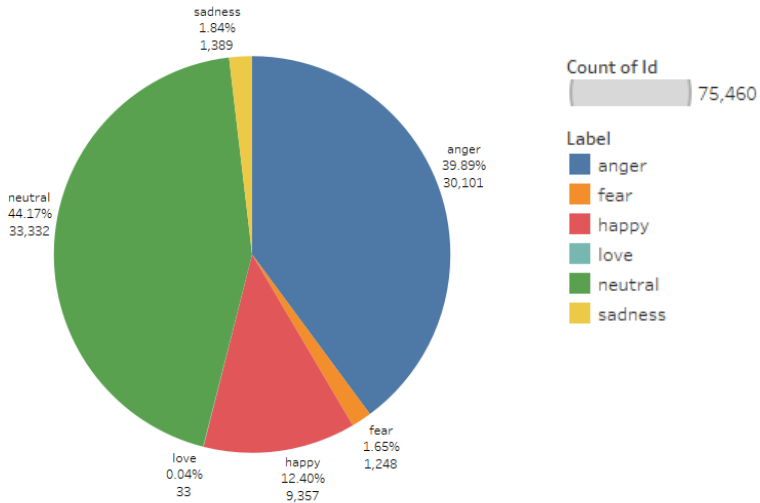
### Top Influencer TWK KPK



Created with Datawrapper

*Sumber: Hasil Big Data Tim Penulis*

Namun di sisi lain, akun @dennysiregar7 yang juga merupakan salah satu *top influencer* membingkai isu TWK dengan narasi yang bertolak belakang dengan narasi yang dibangun oleh @nazaqistha. Ia menyatakan bahwa proses penyaringan kembali menggunakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah metode untuk menghilangkan berbagai pegawai KPK yang dianggap radikal.



Sumber: Hasil Big Data Tim Penulis

Isu TWK memicu berbagai respons yang berbeda-beda dari masyarakat pengguna media sosial. Dari data yang diambil, isu TWK memantik kemarahan publik, dimana ada 39,89% cuitan menunjukkan emosi anger. Di samping itu, sejumlah 44,17% memilih untuk bersikap netral. Namun, sejumlah 12,40% menyampaikan narasi senang terhadap isu TWK KPK ini. Sekalipun banyak jaringan di kubu kontra TWK yang terbentuk, sentimen negatif masyarakat di media sosial Twitter tidak berbanding lurus dengan besarnya jaringan yang terbentuk.

## ***POLITICAL POLARIATION* DALAM ISU PELEMAHAN KPK**

Polarisasi yang terjadi di peristiwa Revisi Undang-Undang KPK, terpilihnya Firli Bahuri sebagai ketua KPK, dan Tes Wawasan Kebangsaan menunjukkan fragmentasi kelompok homofilik yang kuat. Fragmentasi yang kuat ini dapat dilihat dari jauhnya jarak jaringan dalam SNA yang menunjukkan tidak ada ruang diskusi dan pertukaran informasi. Polarisasi ini terbentuk karena ruang gema yang menyudutkan sudut pandang seseorang dalam menilai suatu isu publik. Menurut Yarchi *et.al.*, (2020), salah satu aspek terbentuknya polarisasi adalah jarak interaksi yang semakin jauh dengan orang yang berbeda sudut pandang.

Dari ketiga fenomena tersebut, polarisasi juga terjadi karena ikatan homofilik, dimana kecenderungan politik seseorang dilekatkan pada suatu kelompok tertentu. Dalam hal ini, aktor menjadi jembatan untuk mempertemukan mereka yang memiliki pemikiran serupa. Menurut Yarchi *et.al.*, (2020), polarisasi dimaknai sebagai jenis sikap terhadap suatu masalah, keyakinan, dan pilihan politik. Dari fenomena RUU KPK, Ketua KPK, dan TWK, polarisasi muncul atas sebuah masalah di tubuh KPK yang akhirnya

didefinisikan oleh dua kubu secara berbeda. Kubu oposisi pemerintah menilai terjadi masalah pelemahan KPK sedangkan di kubu pro pemerintah menilai bahwa KPK sangat lemah dan perlu diperkuat.

Homogenitas kelompok membuat individu memiliki kecenderungan menyuarakan pendapat populer di dalam kelompok untuk mendapatkan persetujuan dari sebanyak mungkin anggota Perisly & Tucker (2020). Oleh karena itu, pemilihan isu sangat penting untuk mempersuasi orang-orang agar masuk ke dalam kelompok. Dengan isu yang sensitif, maka aktor akan lebih mudah mendapatkan simpati dari target sasaran. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan isu taliban yang mewarnai dinamika pelemahan KPK mulai dari peristiwa RUU KPK sampai TWK. Isu taliban yang kebenarannya belum pernah terbukti menjadi narasi yang terus dibawa untuk disodorkan kepada kelompok anti separatisme. Dengan cara tersebut, dukungan terhadap pemerintah mengenai kebijakan KPK dipahami sebagai upaya menyelamatkan bangsa.

Polarisasi politik dapat diidentifikasi melalui pendekatan *entire field approach* dan *selective approach*. Pendekatan *entire field approach* digunakan untuk menjelaskan keberadaan polarisasi, dilihat melalui pemetaan aktor-aktor

yang saling berhubungan. Berikutnya, polarisasi politik akan dianalisis melalui pendekatan *selective approach* untuk melihat isi cuitan aktor dengan tujuan mengidentifikasi orientasi politik seseorang.

Dari fenomena RUU KPK, tidak terdapat akun politisi atau akun dengan identitas pribadi yang menjadi *top influencer* di jaringan mereka. Tetapi, *top influencer* berasal dari media berita dan akun anonim. Selain itu, tidak terdapat polarisasi yang dapat dianalisa lebih jauh karena kelompok kontra akun @asumsi.co, @mt\_reborn, @partaisocmed dan @infosumbar tidak teridentifikasi dengan baik.

Dari fenomena pasca pemilihan ketua KPK, terdapat akun @msaid\_didu yang mengikuti akun @zarazettirazr. Selanjutnya, akun Taufiqurrahman saling mengikuti akun *buzzer* @zarazettirazr @tijabar @do\_ra\_dong. Selain itu, akun @zarazettirazr @tijabar @do\_ra\_dong yang merupakan akun *buzzer* saling mengikuti satu sama lain. Dari data tersebut, menunjukkan bahwa terdapat aktor politik yang memiliki hubungan dekat dengan akun *buzzer* dalam upaya mendominasi wacana publik.

Sementara itu, di pihak kelompok pro terhadap kebijakan pemerintah mengenai ketua KPK terdapat akun Denny Siregar, Ferdinand Hutahaean, dan Eko Kuntadhi yang saling



mengikuti. Ketiga aktor tersebut bukan politisi yang berada di dalam lingkaran kekuasaan negara namun memberikan dukungan penuh terhadap pemerintah dalam isu KPK. Dari data ini menunjukkan bahwa tidak terdapat aktor politik yang menonjol di pusat jaringan Denny Siregar dalam memperbincangkan isu ketua KPK.

Cuitan yang dilakukan oleh para politisi menunjukkan orientasi politiknya mengarah pada ketidakpercayaan terhadap kinerja lembaga KPK setelah Firli Bahuri memimpin KPK. Hal ini dapat dibuktikan dari cuitan mereka yang ragu dengan nasib penanganan korupsi di tangan Ketua KPK (Firli Bahuri).

*"Panteslah @febridiansyah mundur dr @KPK\_RI ketua KPK saja spt ini gmn KPK bisa hebat spt dulu lg. Mending bubarin deh KPK krn sdh gak jelas lagi kinerjanya. Sumber dr @CNNIndonesia" - @msaid\_didu*

*"KPK kini menjadi tangan kanan presiden untuk berantas korupsi seperti halnya kejaksaan agung dan kepolisian. Prediksi saya, pada periode ini tdk akan ada Ott utk pembantu2 presiden! Para koruptor akan berpesta pora, rakyat dapat remah2nya. Merdeka!" - @taufiq\_pd\_dki*

*“Terus terang saya ragu dengan Pimpinan @KPK\_RI saat ini, berani melanjutkan kasus Basuki Hariman lebih lanjut, apalagi sejak awal tdk tegas menindak scr pidana 2 orng penyidik KPK dr kepolisian yg diduga merusak barang bukti yg menurut laporan investigasi Tempo ada nama Kapolri.” - @dahnilanzar*

Dari ketiga aktor politik tersebut sudah jelas bahwa mereka memiliki orientasi dan kepentingan politik yang sama mengenai isu pelemahan KPK. Mereka banyak menyoroti mengenai independensi, kinerja, dan kepercayaan terhadap Ketua KPK.

Polarisasi yang terjadi di kubu pro pemerintah dalam kebijakan KPK menunjukkan kecenderungan orientasi politik diwarnai oleh isu taliban. Selain isu taliban yang dihadirkan oleh *influencer* seperti @dennysiregar7, terdapat pula dukungan kepada Ketua KPK (Firli Bahuri) dalam mengusut tuntas kasus korupsi. Dukungan ini dibuktikan dari cuitan Mahfud MD yang dengan jelas siap membantu ketua KPK agar tidak diintervensi.

Dari dua polarisasi yang didasarkan pada orientasi politik, ternyata resistensi terhadap KPK jauh lebih kuat daripada dukungan terhadap KPK. Keraguan terhadap kinerja ketua

KPK juga dibuktikan dengan 10 cuitan teratas mengenai ketua KPK mulai dari tanggal 16 September 2019 sampai 1 Oktober 2019. Keraguan terhadap Ketua KPK (Firli Bahuri) dan lembaga KPK dapat dilihat dari 10 cuitan teratas berikut.

Dari fenomena TWK, terdapat beberapa pihak yang bermain dalam isu ini. Mayoritas berasal dari media nasional, namun tidak dipungkiri bahwa politisi, aktivis, dan akun palsu juga berperan aktif dalam mereproduksi diskursus yang ada. Secara singkat, kelompok kontra pemerintah mengenai isu TWK memiliki *top influencer*, seperti @nazaqistsha, @febridiansyah, dan @girisuprapdiono yang saling mengikuti di *Twitter*. Dari data ini, dapat diketahui bahwa aktor tersebut merupakan pegiat anti korupsi yang sedang berusaha mendominasi wacana publik dengan menyuarakan KPK sedang dilemahkan. Contohnya, di akun Novel Baswedan @nazaqistsha terdapat cuitan yang termasuk 10 besar *engagement* tertinggi dengan jumlah total *reply*, *likes*, *retweet*, dan *quote tweet* sejumlah 13.558 berbunyi:

*“Prihatin, dan sedih adanya org yg berani “main kasus” di KPK Lebih prihatin lagi krn Pak A. Damanik, Rizka, Yudi dan saya yg ungkap kasus ini justru diupayakan utk disingkirkan dgn alat TWK. Harapan memberantas korupsi mau dimatikan?”*

Dengan tingginya atensi dari publik terhadap cuitan tersebut, maka akun @nazaqistha menaikkan wacana bahwa KPK sudah dilemahkan. Sedangkan di kubu pro pemerintah mengenai kebijakan TWK terdapat akun @dennysiregar7, @rizmaya\_, dan @syarman59 yang menjadi *top influencer* di jaringan mereka. Ketiga akun tersebut memiliki hubungan yang dekat dan bukan berasal dari golongan politisi. Menariknya, ketiga akun tersebut saling mengikuti di *Twitter*. Beberapa akun tersebut senantiasa mempropagandakan narasi anti radikalisme dengan narasi nasionalisme dan anti separatisme. Layaknya yang terjadi di fenomena RUU KPK dan pergantian ketua KPK, narasi anti radikalisme di KPK khususnya menasar pada isu taliban masih terus dipropagandakan hingga isu TWK. Berikut cuitan @dennysiregar7:

*“Nah, syarat utk jadi ASN adalah hrs ikuti tes wawasan kebangsaan, termasuk program anti radikalisme. Org2 WP KPK berontak. Sarang mereka dibongkar. Mrk dihadapkan pada tes psikologi, dgn pertanyaan2 menjebak. Dan akhirnya ketahuan byk yg radikal. Ya, para Taliban itu..”*

Dari pola aktor tersebut, menjadi hal yang meyakinkan bahwa misinformasi diproduksi secara masif dan terorganisir. Pola perilaku *buzzer* yang mengelompok berdekatan

dengan akun @dennysiregar7 membuktikan bahwa narasi yang diangkat oleh akun @dennysiregar diafirmasi dan disebarluaskan oleh akun anonim kecil dan berprofil “nasionalis” yang banyak. Tulisan ini tidak bisa membuktikan siapa dalang dibalik *buzzer-buzzer* ini, tetapi artikel ini bisa mengatakan bahwa ada aktor yang berusaha menguasai ruang diskursus masyarakat terkait penolakan TWK KPK menggunakan isu taliban.

Dari rangkaian tiga peristiwa tersebut, polarisasi politik di media sosial *Twitter* terbentuk melalui narasi populis yang membangkitkan sensitivitas ideologi. Hal ini dapat dilihat pada salah satu jaringan yang mendukung pelemahan KPK dengan membawa isu taliban. Isu taliban mudah diasosiasikan dengan isu separatisme yang bertolak belakang dengan ideologi nasionalisme. Oleh karenanya, isu ini digunakan untuk mengelompokkan orang-orang nasionalis ke dalam jaringan atau kelompok yang pro terhadap RUU KPK, pemilihan ketua KPK, dan TWK.

Menariknya, media berita hadir dalam membentuk fragmentasi yang menciptakan ruang gema informasi pada pengikutnya. Hal ini dapat ditunjukkan bagaimana akun media Tempo kerap mendominasi lalu lintas media sosial

di antara isu pelemahan dan penguatan KPK. Berbicara mengenai posisi media dalam isu pelemahan KPK, tulisan ini melihat bahwa media arus utama selalu berada di tengah antara kubu pro dan kontra.

## ***POLITICAL DISINFORMATION* DALAM ISU PELEMAHAN KPK**

Dari beberapa temuan tersebut, tulisan ini menyimpulkan bahwa *platform* media sosial dapat merancang fungsi yang memungkinkan publik menerima tanggapan proaktif terhadap berita palsu yang membahayakan (Cabanes, 2020). Namun di sisi lain, media sosial juga dapat memperkuat koneksi sosial antara satu orang dengan orang lain. Disinformasi menurut Shanto Iyengar dan Adam Simon (2020) ditengarai oleh “resonansi pesan”, dimana narasi yang dibangun bukan dititikberatkan pada substansi argumen, melainkan menysar pada kecenderungan sentimen publik yang berlaku. Dampak dari disinformasi yang semakin masif adalah masyarakat yang kurang informasi akan semakin terpisah dan terpolarisasi di sepanjang garis partisan, yang akhirnya membuat kompromi politik semakin tidak mungkin (Tucker *et.al.*, 2018).

Tulisan ini menemukan bahwa isu pelemahan KPK tidak hanya berisi narasi terkait pro kontra RUU KPK, pergantian ketua KPK, ataupun isu TWK. Namun di balik itu semua, beredar narasi anti radikalisme yang belum tentu benar adanya. Tetapi, isu tersebut terus diresonansikan untuk memengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih keberpihakannya. Tulisan ini melihat bahwa mempersuasi publik antara isu nasionalisme dan isu radikalisme menjadi senjata utama dalam membangun sentimen buruk terhadap KPK.

Disinformasi ini terus berkembang dengan memanfaatkan akun-akun yang berkedok nasionalistik. Hal ini divalidasi dengan adanya banyaknya sentimen *anger* atau marah dalam wacana pelemahan KPK. Dari fenomena itu, kualitas demokrasi Indonesia terus akan dipengaruhi narasi *mainstream* yang penuh dengan ketidak-akuratan informasi yang pada akhirnya berdampak pada polarisasi. Isu KPK senantiasa dikonstruksi dan diperdebatkan dari berbagai pihak pro maupun kontra sehingga masyarakat yang tidak mempunyai kepentingan di dalamnya seakan terisolasi secara intelektual. Sebab, produksi informasi hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan.

Disinformasi hadir ketika misinformasi dipropagandakan dengan masif dan terorganisir (Persily & Tucker, 2020). *Political disinformation* merupakan misinformasi yang dipropaganda oleh aktor tertentu untuk mendominasi narasi publik di media sosial dan semakin menegaskan bias yang tercipta di masyarakat. Dalam fenomena pelemahan KPK, satu narasi besar yang mencerminkan *political disinformation* diproduksi oleh kelompok-kelompok yang pro terhadap pemerintah mengenai RUU KPK, pemilihan ketua KPK, dan TWK. Narasi besar itu adalah keberadaan taliban di tubuh KPK.

*“Menarik. Di dalam @KPK\_RI , ketika ada perubahan status pegawai menjadi ASN, dibuatlah ujian tentang wawasan kebangsaan. Dan kabarnya, banyak yg gak lolos dan bakalan dipecat. Termasuk si Nopel. Ini membuktikan di dalam @KPK\_RI ada kelompok taliban.” (Denny Siregar)*

Taliban adalah sebuah misinformasi. Tidak ada satu pun pembuktian yang dapat dipahami secara akademis dan bertanggung jawab mengenai keberadaan taliban di tubuh KPK. Narasi yang belum tervalidasi kebenarannya ini sengaja



diproduksi dan dipropagandakan untuk semakin menegaskan bias yang terjadi. Oleh karena itu, akun-akun *Twitter* yang berada di jaringan akun pro pemerintah memiliki profil yang nasionalis dengan atribut-atribut di deskripsi akun mereka.

## ***POLITICAL BEHAVIOR* MASYARAKAT DALAM MENANGGAPI ISU PELEMAHAN KPK**

Berdasarkan temuan-temuan yang sudah dijelaskan pada uraian sebelumnya, maka dapat diasumsikan bahwasanya perilaku politik masyarakat telah mengalami polarisasi yang cukup signifikan terutama dalam isu pergantian jabatan ketua KPK dan pelaksanaan TWK. Polarisasi ini dapat terbentuk melalui sikap menyetujui, tidak menyetujui, atau netral atas indikasi wacana pelemahan KPK yang diaktualisasikan melalui cuitan di *Twitter*.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pembentukan perilaku politik masyarakat, yaitu *pertama*, lingkungan sosial politik tidak langsung. Faktor ini memengaruhi bagaimana masyarakat memahami sistem politik yang sedang bekerja biasanya dapat diukur melalui operasionalisasi media massa dan media sosial. Berdasarkan temuan kajian disini, maka dapat dikatakan media sosial atau lebih spesifik *Twitter* merupakan ruang publik baru yang

dapat digunakan masyarakat untuk berdiskusi mengenai isu-isu sosial politik dalam level makro. Hal ini disebabkan tidak adanya batasan bagi masyarakat untuk terkoneksi satu sama lain, baik *person to person* atau bahkan *tweet to tweet*. Masyarakat akan memilih dan memihak terhadap isu yang sering bersentuhan dengan mereka. Maka, tak jarang apabila masyarakat yang umumnya berada dalam sikap yang sama akan berinteraksi dengan akun-akun yang paling dekat dengan pendirian politik mereka. Hal inilah yang kemudian mengarah pada terbentuknya *echo chamber* (Morozov, 2011). Terbentuknya *echo chamber* sangat memengaruhi bagaimana perilaku masyarakat dalam menanggapi isu pelemahan KPK dapat diidentifikasi.

*Kedua*, lingkungan sosial politik langsung. Faktor ini akan memengaruhi dan membentuk kepribadian aktor-aktor politik secara langsung melalui sosialisasi dan internalisasi nilai. *Ketiga*, struktur kepribadian yang tercermin melalui cuitan yang dikeluarkan. Faktor ini berhubungan dengan faktor kedua karena secara langsung memengaruhi pembentukan kepentingan dan penyesuaian diri. Dalam isu pelemahan KPK, tulisan ini telah mengidentifikasi beberapa akun yang dilabeli sebagai pihak pro terhadap adanya indikasi pelemahan KPK. Akun-akun tersebut diisi oleh akun yang sejak awal telah menyatakan diri sebagai oposisi pemerintah,

misalnya @sahabaticw untuk isu RUU KPK, @fadhilasiariii3 untuk isu pergantian Ketua KPK, dan @febridiansyah untuk Isu TWK. Akun-akun oposisi ini secara konsisten menggaungkan narasi penolakan terhadap isu RUU KPK, pergantian ketua KPK, dan pelaksanaan TWK karena adanya internalisasi nilai kontra dalam mencapai kepentingan mereka dan hal ini juga berlaku sebaliknya. Sedangkan bagi akun-akun media yang bersikap netral, mereka hanya berfokus pada kegiatan pembaharuan informasi seputar masing-masing isu dalam wacana pelemahan KPK.

## **KESIMPULAN**

Tulisan ini menunjukkan adanya fenomena polarisasi dan disinformasi yang memengaruhi perilaku politik masyarakat di media sosial *Twitter* dalam wacana pelemahan KPK. Dari fenomena RUU KPK, ketua KPK, dan TWK, polarisasi terbentuk akibat adanya perbedaan pendapat yang dicuitkan antara pihak pro dan pihak kontra mengenai permasalahan yang ada di dalam tubuh KPK. Pihak kontra yang menjadi oposisi pemerintah menilai bahwa KPK sedang dilemahkan dengan munculnya berbagai kebijakan yang mengurangi independensi KPK. Sedangkan kubu pro pemerintah menilai bahwa KPK perlu diperkuat melalui proses restrukturisasi. Pihak pro didominasi oleh akun-akun politisi yang saat ini

tengah menjabat di lingkup pemerintahan, seperti Denny Siregar, Ferdinand Hutahaean, dan Eko Kuntadhi. Cuitan-cuitan mereka kemudian diafirmasi oleh banyak akun anonim yang dapat digolongkan sebagai *buzzer*. Sedangkan pihak kontra didominasi oleh aktivis anti-korupsi dan beberapa akun anonim. Posisi media selalu berada di tengah antara kubu pro dan kontra. Sebab, cuitan yang dikeluarkan hanya berupa informasi-informasi terkini terkait perkembangan isu pelemahan KPK.

Selanjutnya, satu narasi besar yang menggambarkan adanya fenomena *political disinformation* dalam isu pelemahan KPK diproduksi oleh kelompok-kelompok yang pro terhadap pemerintah. Akun-akun tersebut mengangkat isu taliban yang diasosiasikan dengan isu separatisme yang bertolak belakang dengan ideologi nasionalisme. Penggunaan isu taliban ditujukan untuk membedakan pandangan masyarakat terhadap kelompok pro dan kontra pelemahan KPK. Pihak pro diasosiasikan dengan kelompok nasionalis karena narasi yang dilontarkan mendukung kebijakan pemerintah dan kelompok kontra diasosiasikan dengan kelompok radikal yang berusaha memecah persatuan.

Mengenai perilaku politik masyarakat dalam menanggapi isu pelemahan KPK di media sosial *Twitter*, terdapat internalisasi nilai yang diakibatkan oleh adanya fenomena

*echo chamber* atau keterpaparan pengguna sosial media terhadap informasi yang disukainya. Maka, tak jarang apabila masyarakat yang umumnya berada dalam sikap kontra akan berinteraksi dengan akun-akun yang paling dekat dengan pendirian politik mereka, yaitu akun-akun oposisi dan berlaku sebaliknya.

Ketiga fenomena tersebut menyebabkan besarnya fragmentasi informasi di dunia maya. Kualitas informasi saat ini sangat dipengaruhi oleh siapa yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi informasi dalam kuantitas lebih banyak sehingga hal tersebut memberi dampak pada pilihan politik masyarakat. Dengan demikian, kita perlu berefleksi mengenai kualitas demokrasi kita di era informasi saat ini.

## REFERENSI

- Afrimadona. (2021). Revisiting Political Polarisation in Indonesia: A Case Study of Jakarta's Electorate. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40 (2), 315–339. <https://doi.org/10.1177/18681034211007490>.
- Andriani, R. T. (2019). Peranan Media Informasi dalam Mengarahkan Perilaku Politik. *Studi Pustaka*, 7 (1).
- Barberá, P., (2014). How Social Media Reduces Mass Political Polarization. Evidence from *Germany, Spain, and the U.S. Working Paper*. Retrieved September 18, 2019, from <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.658.5476>.
- Blondel, V. D., Guillaume, J. L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, 2008(10), P10008.
- Bradshaw, S., & P. N. Howard. (2017). Troops, Trolls and Troublemakers: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation. *Computational Propaganda Research Project*, Vol. 12, No. 12, Issue 1. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(59\)90596-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(59)90596-3).
- Bruns, A., & T. Highfield. (2013). Political Networks on Twitter: Tweeting the Queensland State Election. *Information, Communication & Society*, 16 (5), 667–691

- Cabanes, J. V. (2020). Digital Disinformation and the Imaginative Dimension of Communication. *Advancing Journalism and Communication Research: New Theories and Concepts*, 97 (2), 435–452.
- Cha, M., Haddadi, H. F. Benevenuto, & K. P. Gummadi. (2010). Measuring User Influence on Twitter: The Million Follower Fallacy. In *Proceedings of the Fourth International AAAI Conference on Weblogs and Social Media* (pp. 10–17). Association for the Advancement of Artificial Intelligence.
- CNN Indonesia. (2019). KPK Ungkap 4 Upaya Sistematis Pelemahan Pemberantasan Korupsi. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20190908160004-12-428554/Kpk-Ungkap-4-Upaya-Sistematis-Pelemahan-Pemberantasan-Korupsi>.
- Colleoni, E., A. Rozza, & A. Arvidsson. (2014). Echo Chamber or Public Sphere? Predicting Political Orientation and Measuring Political Homophily in Twitter Using Big Data. *Journal of Communication*, 64 (2), 317–332.
- Dombrowski, D. A. (2001). *Rawls and Religion: the Case for Political Liberalism*. Albany: Suny Press.
- Druckman, J. N., M. S. Levendusky, & A. McLain. (2018). No Need to Watch: How the Effects of Partisan Media can Spread via Interpersonal Discussions. *American Journal of Political Science*, 62, 99–112.

- Guess, A., B. Lyons, B. Nyhan, & J. Reifler. (2018). *Avoiding the Echo Chamber About Echo Chambers: Why Selective Exposure to Like-Minded Political News is Less Prevalent Than You Think*. Miami, FL: John S. and James L. Knight Foundation.
- Hameleers, M. & T. G. L. A. van der Meer. (2019). Misinformation and Polarization in a High-Choice Media Environment: How Effective Are Political Fact-Checkers? *Communication Research*, 1–24, <https://doi.org/10.1177/0093650218819671>.
- Iyengar, S., & A. F. Simon. (2000). New Perspectives and Evidence on Political Communication and Campaign Effects. *Annual Review of Psychology*, 51 (1), 149–169.
- Iyengar, S., G. Sood, & Y. Lelkes. (2012). Affect, not Ideology: A social Identity Perspective on Polarization. *Public Opinion Quarterly*, 76 (3), 405–431. <https://doi.org/10.1093/poq/nfs038>.
- Komariah, K., & D. S.Kartini. (2019). Media Sosial dan Budaya Politik Generasi Milineal dalam Pemilu. *ARISTO*, 7 (2), 228–248.
- Kuklinski, J. H., P. J. Quirk, J. Jerit, D. Schweider, & R. F. Rich. (2000). Misinformation and the Currency of Democratic Citizenship. *The Journal of Politics*, 62 (3), 790–816.



- Kurnia, N., & A. Savirani. (2020). *Big Data untuk Ilmu Sosial, antara Metode Riset dan Realitas Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Maulana, Ardian dan Hokky Situngkir. (2021). Media Polarization on Twitter During 2019 Indonesian Election. *SCI 943*, pp. 660–670, 2021. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-65347-7\\_55](https://doi.org/10.1007/978-3-030-65347-7_55).
- Morozov, E. (2011). *The Net Delusion: How not to Liberate the World*. London: Penguin Books.
- Mutz, D. (2006). *Hearing the Other Side: Deliberative versus Participatory Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Parsons, B. M. (2010). *Social Networks and the Affective Impact of Political Disagreement*. *Political Behavior*, 32(2), 181–204. <https://doi.org/10.1007/s11109-009-9100-6>.
- Persily, N., & J. A. Tucker. (2020). *Social Media and Democracy (SSRC Anxieties of Democracy)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Purnama, R. (2021). Arahan Jokowi soal TWK KPK Bangkitkan Pro-Kontra Netizen. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/Teknologi/20210518073520-192-643602/Arahan-Jokowi-Soal-Twk-Kpk-Bangkitkan-Pro-Kontra-Netizen>.

- Recuero, R., G. Zago, & F. Soares. (2019). Using Social Network Analysis and Social Capital to Identify User Roles on Polarized Political Conversations on Twitter. *Social Media + Society*, 5 (2), 205630511984874. <https://doi.org/10.1177/2056305119848745>.
- Riansyah, R. (2019). Pengaruh Media Sosial Facebook dan Instagram terhadap Perilaku Politik Masyarakat Kecamatan Gandus. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- Rumata, Vience. (2020). An Analysis of Fake Narratives on Social Media during 2019 Indonesian Presidential Election. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication* 36 (4): 351-368, 10.17576/JKMJC-2020-3604-22.
- Settle, J. E. (2018). *Frenemies: How social media polarizes America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Siagian, H. F. (2015). Pengaruh dan Efektivitas Penggunaan Media Sosial SEBAGAI Saluran Komunikasi Politik dalam Membentuk Opini Publik. *Jurnal Al-Khitabah*, 2 (1).
- Taber, C. S., & M. Lodge. (2006). Motivated Skepticism in the Evaluation of Political Beliefs. *American Journal of Political Science*, 50, 755–769. doi:10.1111/j.1540-5907.2006.00214.x.
- Takikawa, H., & K. Nagayoshi. (2017). Analysis of the “Twitter Political Field” in Japan. *2017 IEEE International Conference on Big Data (BIGDATA)*, 3061–3068. <http://arxiv.org/abs/1711.06752>.

- Tucker, Joshua A et.al. (2018). *Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation: A Review of the Scientific Literature*. Loughborough: Loughborough University. <https://hdl.handle.net/2134/37088>.
- Van Aelst, P., et.al. (2017). Political Communication in a High-Choice Media Environment: A Challenge for Democracy? *Annals of the International Communication Association*, 4, 3–27. doi:10.1080 /23808985.2017.1288551.
- Wasserman, S., & K. Faust (1994). *Social Network Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Williams, S. (2017). Rodrigo Duterte’s Army of Online Trolls. *New Republic*. Retrieved from <https://newrepublic.com/article/138952/rodrigo-dutertes-army-online-trolls>.
- Yarchi, M., C. Baden., & N. Kligler-Vilenchik. (2020). Political Polarization on the Digital Sphere: A Cross-platform, Over-time Analysis of Interactional, Positional, and Affective Polarization on Social Media Over-time Analysis of Interactional, Positional, and Affective Polarization on Social Media. *Political Communication*, 00 (00), 1–42. <https://doi.org/10.1080/10584609.2020.1785067>.
- Yui, Jennifer Yang. (2020). Social Media and the 2019 Indonesian Elections: Hoax Takes the Centre Stage. *Southeast Affairs*, Vol. 2020, 155–171, [https://www.researchgate.net/publication/341452275\\_Social\\_Media\\_and\\_the\\_2019\\_Indonesian\\_Elections\\_Hoax\\_Takes\\_the\\_Centre\\_Stage](https://www.researchgate.net/publication/341452275_Social_Media_and_the_2019_Indonesian_Elections_Hoax_Takes_the_Centre_Stage).

Zuiderveen Borgesius, *et.al.* (2016). Should We Worry about Filter Bubbles? *Internet Policy Review*, 5 (1). <https://doi.org/10.14763/2016.1.401>.